

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM
MEMBANGUN DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN PANGEAN
TAHUN 2011**

PUTRI OCTADITA

DOSEN PEMBIMBING : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

**Kampus Universitas Riau Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Simpang
Baru Pekanbaru 28293**

(0761) 63277 , 35675

Email : putrioctadita@yahoo.co.id

ABSTRACT

The study is titled "Government Efforts in Developing Kuantan Singingi District village in the district of Pangean left in 2011" The background of this research with the decree Kuantan Singingi 432.2 No. 2008 on the Regional Action Plan for Disadvantaged Areas in 2009 and supported by Law No. 32 year 2004 on regional administration, that where the law states that the development of the District / City organized by the principles of democracy, community participation, equity, justice, and considering the potential and diversity of the region

Issues contained in this research is that there are still left in the village Singingi Kuantan district. Therefore this study aims to determine how Kuantan Singingi District Government efforts in building a village in the district of Pangean Disadvantaged in 2011 and to overcome obstacles in the development of underdeveloped villages. The method used in this study is a qualitative method that describes the data descriptively. Data collection techniques used are documentation and field studies by interview. While the sources of data used are primary data collected from the study site and supported by secondary data.

Based on the results of research conducted there are several inhibiting factors such as limited financial resources, the quality of a lack of human resources, lack of training and supervision, and misses the point. Kuantan Singingi District government whereas has made several attempts to improve the construction of which improve the quality of education, infrastructure development liaison, improving the quality of public estates but not optimal in practice.

Keywords :Government Efforts, Build, Village Backward

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seperti kita ketahui bersama bahwa 60% penduduk Indonesia tinggal di Desa. Desa Indonesia memiliki karakteristik yang khas, mulai dari potensi-potensi yang ada hingga berbagai permasalahan yang membuat desa ditinggalkan warganya. Seperti permasalahan bencana alam, merupakan faktor penghambat pertumbuhan perdesaan salah satunya adalah banjir, ini terjadi akibat ekosistem yang rusak, penebangan liar terjadi dimana-mana, yang membuat pohon penyerapan air berkurang, serta sampah yang berserakan disungai menyumbat alirannya.

Dikarenakan ekonomi rendah, mata pencaharian yang kurang dan lahan yang kurang untuk memuhi kebutuhan hidup, serta pendidikan yang rendah, kemudian transportasi sangat tidak mendukung lajunya perkembangan desa, dimana transportasi dan infrastruktur itu bisa memperluas jaringan serta control otonomi dan perhatian pemerintah terjangkau. Desa yang tertinggal penghambat utamanya adalah kurangnya infrastruktur, seperti jembatan untuk keluar untuk mencari nafkah, menuntut ilmu harus melewati sungai dengan menggunakan alat transportasi seadanya, dan itupun masih kurang, jika melalui jalan darat terlalu jauh, dan sunyi, sehingga membuat warga untuk memilih transportasi air, dan mengantri untuk mencapai tujuan dan itu membuat mereka terlambat bekerja atau bersekolah.

Sesuai dengan topik permasalahan yang akan di teliti yaitu tentang Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Membangun Desa Tertinggal. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 432.2 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2009. Sasaran pembangunan Desa tertinggal Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan indeks kemiskinan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal;
2. Membuka aksesibilitas daerah internal dan eksternal melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi;
3. Mengembangkan sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan industri;
4. Meningkatkan laju pendapatan penduduk melalui penciptaan lapangan pekerjaan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar dibidang sosial ekonomi, melalui pembangunan fasilitas dasar ekonomi;
6. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru pada kawasan potensial.

Menurut Schumacher dalam Sudu Wastiono dan Irawan Tahir (2007:3) berpendapat bahwa selama beban hidup di pedesaan tidak dapat diringankan, masalah kemiskinan di dunia ini tidak akan dapat diselesaikan dan mau tidak mau pasti akan lebih buruk, selanjutnya dia mengemukakan bahwa dari berbagai sebab kemiskinan faktor-faktor material seperti kekurangan kekayaan alam atau tidak ada modal, tidak cukup prasarana utamanya hanya merupakan sebab kedua saja.

Sebab-sebab utamanya adalah kekurangan dibidang pendidikan, organisasi dan disiplin.

Adapun jenis-jenis desa dapat di kategorikan sebagai berikut :

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sdm / sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.(Tri Haryanto,2007:9).

Salah satu kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang masih memiliki desa tertinggal adalah Kecamatan Pangean dimana dari 14 desa yang ada terdapat 6 desa yang masih tertinggal, hal ini dibuktikan dari minimnya jumlah sarana pendidikan, kesehatan, dan transportasi darat, selain jauhnya jarak Kecamatan Pangean khususnya 6 desa tersebut dengan ibu kota kabupaten, kondisi jalan raya yang sangat rusak, berlubang dan apabila hujan sangat sulit di lalui oleh kendaraan roda empat, dan musim kemarau jalanannya berdebu.

Tabel I.1 Desa-desa tertinggal di Kecamatan Pangean 2011

No	Nama Desa	Luas wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Status Desa
1.	Pembatang	8,00	1.035	Swadaya
2.	Padang Kunik	4,00	830	Swadaya
3.	Padang Tanggung	3,00	496	Swadaya
4.	Teluk Pauh	6,00	441	Swadaya
5.	Tanah Bekali	10,03	1.060	Swadaya
6.	Pulau Deras	7,50	951	Swadaya
	Total	38,53	4813	

Sumber : Kantor Camat Pangean 2011

Karakteristik Desa Tertinggal yaitu :

1. Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada:
 - a. Air Bersih,
 - b. Listrik,
 - c. Irigasi
2. Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada:
 - a. Sarana Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri)
 - b. Sarana Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan)
 - c. Sarana Transportasi: (Terminal, Stasiun, Bandara, dll)
3. Perekonomian masyarakat rendah (Miskin/Pra Sejahtera)
4. Tingkat Pendidikan Rendah (Terbelakang/Pendidikan kurang dari 9 tahun)
5. Produktivitas Masyarakat Rendah (Pengangguran pada usia produktif).
(Ani Anjayani(2007:24)

Defenisi dari Desa Tertinggal adalah kawasan Perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana Dasar Wilayahnya kurang/ tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan), dan bidang pendidikan (terbelakang). (ciptakarya.blog.spot)

Tabel I.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Tertinggal Kecamatan Pangean tahun 2011

No	Nama Desa	Jumlah penduduk	SD	SLTP	SLTA	S1
1.	Pembatang	1.035	580	220	100	10
2.	Padang Kunik	830	440	122	61	3
3.	Padang Tanggung	496	200	58	50	5
4.	Teluk Pauh	441	151	50	47	2
5.	Tanah Bekali	1.060	453	259	78	4
6.	Pulau Deras	951	472	89	65	2
	Total	4813	2296	898	301	26

Sumber : Kantor Camat Pangean 2011

Ketertinggalan tingkat kemajuan wilayah perdesaan juga disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas dan kualitas petani dan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap sumber daya alam, permodalan dan pemasaran. Akibatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan, yang mencakup sekitar 60 persen penduduk Indonesia, khususnya petani masih sangat rendah tercermin dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang lebih besar dibandingkan perkotaan.

Tabel I.3 Sarana Pemasaran Yang Terdapat Pada Desa Tertinggal Kecamatan Pangean tahun 2011

No	Nama desa	Sarana pemasaran				
		Pasar	Toko	Warung kelontong	Warung kopi	Rumah makan
1.	Pembatang	-	-	10	4	-
2.	Padang Kunik	-	-	8	2	-
3.	Padang	-	-	7	2	-
4.	Tanggung	-	-	1	1	-
5.	Teluk Pauh	-	-	8	5	-
6.	Tanah Bekali Pulau Deras	-	-	5	3	-
	Total	-	-	39	17	-

Sumber : Kantor Camat Pangean 2011

Kondisi topografi wilayah yang relatif landai dan struktur tanah organosol, rawa-rawa dan humus yang sulit menyerap air sehingga permukaan air cepat naik, dan tidak mampu menahan debit air sungai kuantan yang meluap. Secara rinci desa-desa yang terkena banjir dapat dilihat pada tabel I.4 Berikut :

Tabel I.4 Data yang terkena banjir di Kecamatan Pangean tahun 2011

No	Desa	Luas Wilayah Terkena Banjir (Km ²)	Jumlah Pengungsi
1.	Pembatang	3,33	400 Jiwa
2.	Padang Kunik	2,01	230 Jiwa
3.	Padang Tanggung	2,00	300 Jiwa
4.	Teluk Pauh	3,55	198 Jiwa
5.	Tanah Bekali	4,60	300 Jiwa
6.	Pulau Deras	4,30	400 Jiwa
	Jumlah	19,79	1.810 jiwa

Sumber : Kantor Camat Pangean 2011

Berdasarkan defenisi dan data tersebut maka penulis melakukan observasi kelapangan dan fenomena yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas SDM di Desa Tertinggal relatif lebih rendah, akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.
2. Terbatasnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi bagi upaya pengembangan ekonomi lokal;
3. Kurangnya sarana aksesibilitas yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain, seperti tidak adanya jembatan penghubung;
4. Bencana yaitu berupa banjir dikarenakan belum adanya peningkatan tebing sungai berbentuk turab;
5. Komunitas adat terpencil (KAT) memiliki akses yang sangat terbatas kepada pelayanan sosial ekonomi, dan politik serba terisolir dan wilayah di sekitarnya;

Penyeimbangan pembangunan sudah saatnya mulai dilaksanakan diantaranya memulai pembangunan Desa Tertinggal sesuai kebutuhan kondisi fisik setempat dan kebutuhan komunitas dalam menunjang kehidupan dan penghidupan sehari-harinya. Desa tertinggal secara rata-rata dapat dikategorikan sebagai wilayah yang pelayanan infrastruktur jauh dari standar minimal.

Otonomi Desa merupakan landasan untuk mewujudkan keswadayaan pembangunan yang dimulai dari ruang lingkup pemerintahan terkecil, terutama dalam aspek prakarsa, pengelolaan serta tambahan dana. Maka berjalan tidaknya program pembangunan yang dicanangkan sangat bergantung pada siap tidaknya masyarakat desa secara keseluruhan untuk ikut serta menjadi bagian dari pembangunan itu. Disinilah kecamatan memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa. Ini dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak pemerintahan Desa.

B. Kerangka teori

Salah satu tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah meningkatkan pembangunan daerah yang bersangkutan agar dalam melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah daerah tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan dana agar tujuan dari otonomi tersebut dapat tercapai.

Peran suatu pemerintah salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat, salah satu contohnya adalah seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dengan membangun desa-desa tertinggal.

Pada penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa : “ Otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian menurut Parker dalam Syaukani (2004:30) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tujuan atau serangkaian prinsip tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan suatu subjek atau tanggapan pada suatu krisis.

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana, implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui regulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho, 2006:158).

C. Metode penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Metode ini menjelaskan bagaimana Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam membangun desa tertinggal di Kecamatan Pangean tahun 2011.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis mengambil lokasi di kecamatan Pangean secara sengaja (purpose) berdasarkan kekurangan-kekurangan sarana dan prasarana yang membuat desa-desa tersebut menjadi tertinggal. Seperti kurangnya sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, jalan yang rusak serta tidak ada jembatan penghubung untuk sampai ke ibu kota kecamatan. Kekurangan-kekurangan inilah yang membuat desa-desa tersebut menjadi tertinggal.

2. Informan

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberi keterangan, informan adalah suatu istilah yang memberikan pengertian kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang ia ketahui.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk itu yang menjadi informan adalah 1 orang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 1 orang Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, 1 orang Camat Kecamatan Pangean, 1 orang Kepala Desa pulau deras, 1 orang Kepala Desa Padang Kunik, 1 orang Kepala Desa Tanah Bekali, 1 orang ketua BPD Desa Pulau Deras, 1 orang BPD desa Padang Kunik, 1 orang BPD desa Tanah Bekali.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini dan hambatan-hambatan atau kendala yang ditemukan dan merealisasikannya.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui perpustakaan dan instansi /kantor yang terkait dengan tujuan perolehan data seperti data demografis dan data monografis Kecamatan Pangean. Dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan informan serta melakukan tanya jawab secara langsung. Pertanyaan dalam wawancara kepada informan dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan kreatifitas untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Membangun Desa tertinggal, serta berhubungan dengan teori yang relevan dalam tulisan ini dapat di peroleh dari buku-buku, jurnal dll.

5. Analisa Data

Teknik deskriptif data disajikan dalam bentuk gambaran-gambaran dari temuan-temuan dilapangan yang datanya berupa hasil dari wawancara ,dokumentasi dll.

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk sumber daya manusia yang partisipasinya sangat di perlukan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk juga sebagai objek dimana ia akan menjadi salah satu target dalam setiap proses pembangunan.

Tabel II.2 Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada desa-desa tertinggal di Kecamatan Pangean tahun 2011

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk
1.	Padang Kunik	830	207,50
2.	Tanah Bekali	1.060	105,68
3.	Pulau Deras	951	126,86

Sumber : Kantor camat Pangean 2011

2. Keberadaan Sumber Daya Alam

Sedangkan untuk data luas areal perkebunan di Kecamatan Pangean adalah dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel II.3 Areal perkebunan masyarakat di Kecamatan Pangean Tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	Kebun (Ha)			
		Karet	Sawit	Kelapa	Kakao
1	Padang Kunit	15	1	26	-
2	Tanah Bekali	701	20	24	4
3	Pulau Deras	686	18	24	1
Jumlah		1.402	39	74	5

Sumber : Kantor Camat Pangean tahun 2011

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang tinggi akan memberikan pengaruh positif bagi masa depan bangsa. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang besar pada perkembangan pendidikan.

Tabel II.4 Banyak sekolah yang ada di Desa Tertinggal Kecamatan Pangean tahun 2011

No	Desa	Jumlah Sekolah	TK	SD	MDA	SLTP	SLTA
1.	Padang kunik	1	-	1	-	-	-
2.	Tanah Bekali	1	-	1	-	-	-
3.	Pulau Deras	1	-	1	-	-	-
Jumlah		3	-	3	-	-	-

Sumber : Kantor Camat Pangean 2011

4. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang baik. Yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah membangun sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten, disamping peningkatan tenaga medis. Saat ini di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 1 rumah sakit, 21 puskesmas, 20 puskesmas keliling (puskesmas keliling), 58 Pustu, 13 apotik. Banyaknya sarana dan tenaga medis kesehatan yang terdapat di desa tertinggal Kecamatan Pangean tersebut adalah :

Tabel II.5 Banyak sarana kesehatan dan tenaga medis di Desa Tertinggal Kecamatan Pangean tahun 2011

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Dokter	Bidan	Bidan Kampung
1.	Padang Kunik	-	-	-	-	-	1
2.	Tanah Bekali	-	-	1	-	-	2
3.	Pulau Deras	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	-	-	1	-	-	4

Sumber : Kantor Camat Pangean 2011

PEMBAHASAN

Kehidupan suatu negara adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Termasuk didalamnya sistem perwilayahan dan sistem pemerintahan di Indonesia misalnya, sistem pemerintahan nasional yang mencakupi seluruh wilayah Indonesia menjadi puncak tertinggi sistem pemerintahan, dibawahnya terdapat sistem pemerintahan desa, kenyataan ini merupakan wilayah yang penting dalam wilayah sebuah bangsa.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan data-data yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai upaya-upaya pemerintah kabupaten Kuantan Singingi dalam membangun desa tertinggal di Kecamatan Pangean tahun 2011. Sejalan dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, maka setiap daerah di Indonesia dituntut harus bisa mengurus rumah tangganya sendiri termasuk percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Kuantan Singingi tidaklah selalu berjalan dengan apa yang diharapkan, hal ini dikarenakan hambatan-hambatan muncul baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun swasta yang ikut andil dalam pembangunan tersebut. Pemerintah daerah berharap memperoleh dukungan sebesar-besarnya dan memperkecil hambatan yang ada.

Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintahan daerah dalam melakukan percepatan pembangunan desa tertinggal di Kecamatan Pangean tahun 2011, adalah dengan melihat pelaksanaan pembangunan melalui program-program yang telah ada dan langkah-langkah apa saja yang telah di laksanakan.

A. UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MEMBANGUN DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN PANGEAN TAHUN 2011

1. Peningkatan pendidikan

Program pembangunan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masyarakat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan

pendidikan, baik yang dilakukan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan.

2. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang ekonomi

Program ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani yang mengalami kesulitan untuk memulai usaha dibidang pertanian secara luas. Arah kebijakan program ini adalah membantu masyarakat miskin.

3. Pemberdayaan masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sarana prasarana kesehatan dan produktivitas ketenagakerjaan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, mengadakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, peningkatan hubungan pengusaha dengan tenaga kerja, pembangunan puskesmas Rawat Inap dan menambah tenaga medis yang profesional.

4. Pembangunan infrastruktur penghubung

Untuk membuka daerah pedalaman yang mempunyai sarana dan prasarana penghubung terbatas, diupayakan dengan membangun jaringan jalan dan jembatan baru, serta memperbaiki jalur transportasi yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar akses menuju daerah pedalaman tersebut sehingga kegiatan sosial ekonomi didaerah tersebut dapat berjalan dengan lancar.

5. Meningkatkan Kualitas Perkebunan Masyarakat

Rencana Peningkatan Kualitas perkebunan merupakan bagian dari pembangunan bidang ekonomi dan bagian integral dari pembangunan daerah yang bertujuan meujudkan cita-cita nasional mencapai masyarakat adil dan makmur, sasaran pembangunan perkebunan dalam jangka panjang adalah menciptakan kekuatan dan kemampuan perkebunan yang tangguh.

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MEMBANGUN DESA TERTINGGAL.

Untuk dapat mempermudah penulis dalam melihat implementasi kebijakan tentang upaya pemerintah kabupaten kuantan singingi dalam membangun desa tertinggal dikecamatan pangean, maka penulis menggunakan pendekatan sebagai acuan apakah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan itu berhasil atau tidaknya maka dapat dilihat berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Merille S. Grindlle dalam (Riant Nugroho,2004;174) yaitu keberhasilan suatu kebijakan di tentukan oleh isi kebijakan itu sendiri yang terdiri dari konteks implementasinya, ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka

implementasi kebijakan dilakukan, keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut isi kebijakan mencakup :

1. Kepentingan Yang Terpengaruhi oleh kebijakan

Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan dari Pemerintah Daerah sebagai pihak yang membuat serta melaksanakan peraturan dan kepentingan Desa sebagai penerima manfaat yang dihasilkan .

2. Jenis Dan Manfaat Yang Dihasilkan

Kebijakan Pembangunan Daerah tertinggal melalui strategi daerah tertinggal (SRTADA PDT), yang penanganannya lebih difokuskan pada perencanaan percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta daerah yang ketersediaan infrastruktur masih tertinggal dibanding daerah lainnya.

3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Dengan adanya Rencana Aksi daerah ini Perubahan yang diharapkan adalah berkurangnya angka kemiskinan, infrastruktur perdesaan meningkat, kinerja aparatur Desa meningkat, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong membangun Desa.

4. Kedudukan pembuatan kebijakan

Pembentukan peraturan daerah harus dapat menciptakan suatu aturan yang ideal, dengan terbentuknya aturan yang ideal maka akan tercipta peraturan perundang-undangan yang harmonis dan mudah untuk dapat diterapkan kepada masyarakat sehingga dapat terlaksananya penyelenggaraan suatu negara yang baik.

5. Siapa Pelaksana Implementasi Alokasi Dana Desa

Dalam proses implementasi Peraturan Bupati kuantan singingi nomor 432.2 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan daerah tertinggal tahun 2009, pelaksana adalah seluruh pihak baik pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa bahkan masyarakat.

6. Sumber daya yang dikerahkan

Pemahaman terhadap peraturan daerah ini tidak saja terjadi pada pihak pemerintah daerah saja melainkan juga terjadi pada lapisan masyarakat, sehingga terjadi hubungan yang sinkron terhadap pemerintah dan masyarakat. Hubungan ini bertujuan agar peraturan daerah yang ada dapat dimaksimalkan.

C. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Membangun Desa Tertinggal Di Kecamatan Pangean Tahun 2011

Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan bupati kuantan singingi tentang rencana aksi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal tidak luput

dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses implementasi kebijakan yang ideal adalah terjadinya interaksi dan reaksi dari kelompok pelaksana implementasi dan kelompok sasaran dari pengimplementasian peraturan itu sendiri.

1. Terbatasnya sumber dana

Sumber dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan tidak memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) untuk melaksanakan pembangunan desa.

2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia,

Dalam hal ini aparat desa yang memiliki skill yang baik dan profesional oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kemampuan teknis aparat masih perlu dibenahi, hal ini disebabkan latar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang organisasi dan pemerintah secara umum masih kurang baik.

3. Kurangnya pembinaan dan pengawasan

Pengawasan dan pembinaan dari pemerintah, sementara pada PP Nomor 72 tahun 2005 pasal 98 ayat 2 menjelaskan pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan desa dan lembaga masyarakat, dan tidak terlaksananya pasal 102 yaitu: memfasilitasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengembangan tidak lanjut pembangunan secara partisipatif.

4. Pembangunan Infrastruktur Penghubung

Pembangunan jalan dan jembatan masyarakat masih rendah pemahaman sehingga sulit dalam pembebasan lahan untuk pembangunan, serta tidak adanya dukungan dari beberapa pihak sehingga program sulit teralisasi.

5. Kurang informasi dan tidak tepat sasaran bantuan yang diberikan untuk fakir miskin dan penyandang masalah kesosial lainnya.

6. Belum adanya lembaga ekonomi desa, pemerataan irigasi untuk pertanian, kurangnya modal untuk UKM, koperasi yang ada kurang terkontrol.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup optimal, namun hasilnya masih belum memuaskan, hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun upaya –upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah , Peningkatan kualitas Pendidikan, Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Infastruktur penghubung, Meningkatkan kualitas perkebunan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya Pembangunan Desa tertinggal oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah, Terbatasnya Sumber dana, Rendahnya kualitas sumberdaya Manusia, Kurangnya pembinaan dari pemerintah, Susah dalam pembebasan lahan untuk pembangunan, Kurangnya informasi dan tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan, Koperasi yang ada tidak terkontrol.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut, Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya dapat melakukan Pengawasan, Pembinaan, Pelatihan yang lebih kepada Pemerintah Desa, kerja sama tim harus ada pada kedua belah pihak, Pemerintah Daerah yaitu eksekutif dan legislatif, dan pemerintah Desa sebagai perangkat pendukung di Desa, Konsistensi dalam penyelenggaraan pembangunan yang di mulai dari Visi dan Misi, dilanjutkan dengan strategi, kemudian implementasi, dan ditutup dengan kontrol atau pengendalian, plus semangat reinvensi disetiap momen pembangunan. Konsistensi tidak identik dengan kekuatan namun justru dengan disiplin.

Daftar Pustaka

- Nugroho, Riant, 2006, *Kebijakan Publik : Untuk Negara-negara Berkembang*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Syaukani, 2004, *Otonomi Daerah Demi kesejahteraan Rakyat*, Nuansa Madani, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 432.2 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009.